

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman banyak bermunculan lembaga keuangan yang berlandaskan syari'at Islam. Diantaranya adalah Baitul Maal wat-Tamwil (BMT). Salah satu dari sekian banyak BMT di Indonesia yang ada di Kabupaten Semarang adalah BMT Al Hikmah, lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan syariat Islam dengan menghimpun dana dari masyarakat, kemudian difungsikan kembali secara operasional, amanah dan adil untuk membentuk kepentingan anggota maupun masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

Keberadaan BMT Ungaran di Kabupaten Semarang, dan beberapa cabang yang salah satunya di Gunungpati II mulai banyak diminati oleh masyarakat, hal ini tidak lain dikarenakan bentuk pelayanan pada BMT yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota, karena menghindarkan anggota dari keraguan atas hukum bunga bank. BMT tidak menerapkan sistem bunga bank melainkan bagi hasil dan *mark up* (jasa yang diberikan oleh anggota atas pembiayaan dari BMT sesuai dengan perjanjian awal atas dana yang dipinjamnya).

Perkembangan UMKM di Indonesia mendorong para pelaku usaha untuk mencari sumber dana tambahan agar dapat menjaga kelangsungan

usahanya. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan pinjaman (pembiayaan) ke bank ataupun koperasi. BMT AL-HIKMAH Cabang Gunung Pati II memanfaatkan peluang dari fenomena tersebut dengan menghadirkan produk pembiayaan *Mudharabah* yang mudah dan fleksibel bagi para pelaku usaha.

Keberadaan BMT mulai banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini tidak lain dikarenakan bentuk pelayanan yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota.dengan menghindarkan anggota dari keraguan atas hukum bunga bank. BMT tidak menerapkan sistem bunga bank melainkan bagi hasil dan *mark up* (jasa yang diberikan oleh anggota atas pembiayaan dari BMT sesuai dengan perjanjian awal atas dana yang dipinjamnya).

Peminat pembiayaan *Mudharabah* yang semakin banyak memacu BMT untuk melakukan penataan pada sistem akuntansi pembiayaan *Mudharabah*. Karena dengan sistem akuntansi yang baik,maka permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dalam produk pembiayaan Mudharabah dapat diminimalisir sedini mungkin.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi pihak BMT dalam produk pembiayaan semakin beragam, permasalahan tersebut bisa disebabkan oleh 2 hal, yaitu sistem yang belum tepat dan kelalaian SDM (*human error*).

Permasalahan yang disebabkan oleh sistem, antara lain tidak terdapat pemisahan tugas secara tepat. Misalnya, petugas yang melakukan survey

kepada anggota merangkap sebagai pembuat keputusan pencairan pembiayaan. Petugas survey merangkap sebagai pemberi pencairan dana pembiayaan, maupun pencatat transaksi pembiayaan.

Selain itu, permasalahan lainnya yang sering terjadi adalah keterlambatan atau pemberhentian pembayaran dari pihak anggota pembiayaan *Mudharabah*. Masalah tersebut bisa terjadi karena kebijakan pembiayaan yang ditetapkan kurang tepat. Kebijakan-kebijakan itu dapat meliputi kebijakan dalam administrasi, kebijakan survey, kebijakan pemberian pembiayaan, maupun kebijakan penagihannya.

Sedangkan faktor yang kedua permasalahan biasanya terjadi karena kesalahan karyawan atau SDM itu sendiri (*human error*) dalam menerapkan kebijakan atau sistem pembiayaan.

Contohnya, petugas kurang teliti saat melakukan survey kepada anggota, sehingga data-data anggota yang tidak sesuai realita tidak dapat terdeteksi pada saat survey. Petugas survey tidak melakukan survey kepada anggota BMT yang merupakan teman atau saudaranya, sehingga data anggota dalam laporan survey dibuat secara subjektif oleh petugas survey, tidak berdasarkan hasil survey yang sebenarnya. Selain itu, karyawan masih kurang tepat dalam melakukan pengarsipan dokumen pembiayaan sehingga menyebabkan salahnya penempatan arsip dokumen salah satu anggota, atau bahkan sampai hilang.

Maka dari itu diperlukan evaluasi sistem pengendalian intern yang lebih baik terhadap prosedur pembiayaan, sehingga permasalahan yang

terjadi baik karena sistem/kebijakan maupun kelalaian SDM (*human error*) dapat diminimalisir sedini mungkin sebelum berkembang menjadi permasalahan yang berkelanjutan secara jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengkaji tentang bagaimana evaluasi penerapan dalam sistem pengendalian intern pembiayaan mudharabah yang terjadi pada BMT AL HIKMAH Cabang Gunung Pati II, untuk itu dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis memberikan judul **“SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AL HIKMAH CABANG GUNUNG PATI II”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan rangkaian latar belakang yang telah di uraikan penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pengendalian intern yang diterapkan untuk mengawasi jalannya pembiayaan mudharabah pada BMT Al Hikmah Cabang Gunung Pati II?
2. Bagaimanakah alternatif untuk mengatasi permasalahan sistem pengendalian intern pembiayaan mudharabah di BMT Al Hikmah Cabang Gunung Pati II?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan pada pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al Hikmah Cabang Gunung Pati II.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi mengatasi permasalahan SPI Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT AL-HIKMAH Cabang Gunung Pati II.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian yang telah diteliti ini diharapkan dapat di gunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang auditing

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pihak BMT AL-HIKMAH Cabang Gunung Pati II**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam prosedur pembiayaan *Mudharabah* sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.